

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
TRI INGGAH WIJAYANTI
NIM. E1011131004

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: triinggahwijayanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini melihat fenomena yang terjadi pada Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Terhadap Petani dalam hal ini khususnya Petani Perkebunan Kelapa Sawit. Fenomena yang terjadi yaitu kurangnya sikap para pelaksana mempertegas peran komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut oleh Dinas Pertanian Kubu Raya belum maksimal dilihat dari beberapa variabel ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, dan sikap para pelaksana dan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam memberikan perlindungan atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang menerimanya. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya kurangnya kontrol pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi, kurangnya pengawasan tentang harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan dan keterkaitan kepentingan pribadi baik sosial, ekonomi dan politik didalamnya. Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan seharusnya Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Kubu Raya harus mengawasi berjalannya kebijakan tersebut sehingga dapat mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani perkebunan.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ukuran dan Tujuan, Komunikasi, Sikap Pelaksana.

THE IMPLEMENTATION OF OIL PALM PLANTATION PROTECTION POLICY ON THE DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZER IN RASAU JAYA DISTRICT KUBU RAYA REGENCY

ABSTRACT

This research aimed to provide understanding on the implementation of oil palm plantation farmers protection policy on the distribution of subsidized fertilizer in Rasau Jaya district Kubu Raya Regency. This research viewed the phenomenon happened on the implementation of Law No. 19/2013 on the protection of farmers, in this case oil palm farmers. The phenomenon happened was that the executives who do not emphasize the role of communication between organizations and the activities held to implement the distribution of subsidized fertilizer. This research is descriptive qualitative research. The result shows that optimal viewed on several variables such as the measurement and the purpose of policy, the communication between organization and the executive's activities, and the executive's attitude in giving protection on the production tools of the distribution of subsidized fertilizer to the people who receive it. Based on the analysis of the interview and observation results, researcher conclude that there are several factors that inhibit the implementations of the policy. This

research suggests that Plantation Office of Kubu Raya Regency should cooperate with Agriculture Office of Kubu Raya Regency to supervise the implementation of the policy in order to increase the income and the prosperity of plantation farmers.

Keywords: Policy Implementation, Measure and Purpose, Communication, Executive Attitude.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kalimantan Barat sangat menjaga hasil dari perkebunan daerahnya. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat prospektif untuk dikembangkan.

Pemerintah telah berupaya untuk melindungi segenap masyarakatnya guna memajukan kesejahteraan masyarakatnya serta berbasis pada keadilan sosial dengan membuat sebuah Undang-undang (UU) nomor 19 tahun 2013 mengenai Perlindungan terhadap Petani dalam hal ini khususnya petani perkebunan, yang secara rinci dijelaskan pada pasal 21 ayat 1 difokuskan pada pemberian sarana produksi tani melalui peyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat guna.

Didalam kebijakan yang di atur dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa kebijakan Perlindungan memiliki tujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha Tani. Dalam Undang-undang ini pula dijelaskan pada

pasal 1 bahwa perlindungan petani merupakan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi seperti pemberian subsidi benih, bibit, pupuk, pestisida sesuai dengan standar dan mutu, kepastian usaha seperti memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah juga keringanan pajak, resiko harga seperti menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani, kemudian menghindari kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Salah satu cara pemerintah untuk mengandalkan sektor perkebunannya adalah melalui pemberian Perlindungan mengenai menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani perkebunan itu sendiri. Sarana Produksi Perkebunan disini dalam berbentuk penyaluran pupuk bersubsidi jenis Nitrogen Phosphat Kalium (NPK) kepada para petani plasma atau biasa di sebut dengan petani swadaya mandiri, yang mana mereka membeli pupuk

bersubsidi kepada pihak distributor ataupun koperasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan harga terjangkau per kilogramnya guna memupuki lahan sawit mandiri mereka agar mereka tidak perlu mengeluarkan banyak ongkos untuk membeli pupuk non subsidi yang harganya bisa berkali-kali lipat setiap kilogramnya namun kualitasnya sama dengan pupuk bersubsidi.

Dalam hal ini pemerintah telah menjamin kualitas pupuk bersubsidi berjenis NPK yang mereka salurkan kepada para petani-petani swadaya mandiri masyarakat. Hanya saja pemerintah disini khususnya Dinas yang ditunjuk oleh pemerintah kurang pengawasan ketat dalam penyalurannya, ada pihak oknum yang memanfaatkan kesempatan menjual pupuk bersubsidi disini melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna meraih untung berlimpah. Kontrol pemerintah disini yang kurang diperketat dalam berjalannya Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani yang sudah bagus dan sangat membantu para petani ini, seperti halnya kontrol dalam menyediakan prasarana dan sarana penyaluran pupuk bersubsidi yang sampai kepada tangan petani yang berhak menerimanya.

Data mengenai penyaluran pupuk pada tahun 2015, penyaluran pupuk bersubsidi tersebut terbilang cukup tinggi.

Namun penyaluran tersebut tidak dapat dirasakan oleh seluruh petani yang membutuhkan hak-haknya yaitu penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang, penyaluran pupuk yang tinggi tidak disertai dengan peran aktif pemerintah guna mengontrol dan memantau langsung bagaimana proses implementasi dilapangan. Pupuk yang paling banyak disalurkan adalah pupuk NPK yang dapat digunakan untuk segala macam perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Dan pupuk NPK merupakan pupuk yang memiliki daya jual dengan harga yang tinggi apabila telah masuk kepada tangan kios-kios yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki ikatan perjanjian dengan pihak pemerintah.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kubu Raya jumlah penyaluran pupuk yang telah direalisasikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 0,45% yang mana tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pupuk yang telah disalurkan. Data yang didapat dilapangan merupakan data para petani yang menerima dan sisanya telah terjual kepada para kios yang mengaku penerima bantuan pupuk bersubsidi

Penelitian ini akan menelaah lebih lanjut berdasarkan pandangan konsep teori yang membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintahan maupun

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh implementor kebijakan, seperti komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, ukuran dan tujuan dari suatu kebijakan dan sikap para pelaksana kebijakan dan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan hal sasaran yang paling penting agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 19 tahun 2013 mengenai Perlindungan terhadap Petani dalam hal ini khususnya petani perkebunan, yang secara rinci dijelaskan pada pasal 21 ayat 1 difokuskan pada pemberian sarana produksi tani melalui peyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat guna.

Didalam kebijakan yang di atur dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa kebijakan Perlindungan memiliki tujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha Tani. Dalam Undang-undang ini pula dijelaskan pada pasal 1 bahwa perlindungan petani merupakan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi seperti pemberian subsidi benih, bibit, pupuk, pestisida sesuai

dengan standar dan mutu, kepastian usaha seperti memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah juga keringanan pajak, resiko harga seperti menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani, kemudian menghindari kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Melihat hal tersebut peneliti ingin menggali lebih mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada penilaian melalui kinerja kebijakan mengenai Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana dan Sikap Para Pelaksana dalam Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literature ilmu politik. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Winarno, 2007:17) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dalam lingkungannya”. Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2007:17) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan menurut Jenkins (dalam Nugroho, 2009:14) “keputusan yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor berkenaan dengan tujuan dan cara mencapainya di dalam situasi khusus”.

Selanjutnya Presman dan Wildacsky (dalam Winarno, 2007:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan Anderson (dalam Nugroho, 2014; 151) memerinci kebijakan publik menjadi lima jenis, yaitu; 1) *constituent* 2) *distributive* 3) *regulatory* 4) *Self regulatory* dan 5) *redistributive*.

Lowi (dalam Nugroho, 2014; 151 - 152) kebijakan yang secara formal dan eksplisit berkaitan dengan pembentukan struktur pemerintahan, dengan dibentuknya peraturan (atau prosedur) untuk pelaksanaan pemerintahan, peraturan yang mendistribusikan atau membagi kekuasaan dan yurisdiksi dalam kebijakan pemerintah sekarang dan masa depan yang mungkin akan dibuat. Khususnya Indonesia meyalurkannya melalui birokrasi pemerintahan dalam membangun aturan atau prosedur untuk penyelenggaraan pemerintahan. Aturan yang ditujukan untuk mendistribusikan atau membagi kekuasaan. Dengan begitu kebijakan ini mengisyaratkan bahwa Negara, melalui pemerintah, senantiasa hadir di tengah masyarakat.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik (*public policy*) di atas yang dipaparkan oleh beberapa ahli, maka bisa ditarik beberapa perbandingan yaitu kebijakan (*policy*) dan publik (*public*). Kebijakan dapat dinyatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh orang secara personal maupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang. Penting untuk dipahami, apapun segala bentuk dan jenis dari kebijakan yang dikeluarkan, suatu kebijakan itu harus berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak tanpa diskriminasi dan dalam jangkauan

kemampuan sumber daya dan aktor untuk mengimplementasikannya.

Implementasi

Kebijakan publik harus memegang teguh aspek keadilan bagi masyarakat atau untuk warga negaranya. Artinya jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari pada kebijakan itu sendiri, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik.

Menurut pendapat Pressman dan Wildavsky (Parsons 2005; 466) mengatakan bahwa “implementasi memerlukan kontrol dan komunikasi yang *top-down*. Implementasi kebijakan membutuhkan sumberdaya agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik.”

George C, Edwards (dalam Winarno, 2007:174) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi”. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang

diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Banyak ahli mengatakan bahwa gagasan Van Meter dan Van Horn yang lahir tahun 1975 merupakan salah satu karya klasik dalam teori implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975; 462-465), (dalam Budi Winarno, 2002; 106 – 118) mengemukakan beberapa variabel yang dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan yaitu ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, sumber-sumber kebijakan, karakteristik kebijakan dan kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksana program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual project apakah tujuan program tersebut tercapai (dalam Agustino, 2006:139).

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang melalui proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi

tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Model yang peneliti gunakan sebagai penelitian ini adalah model teori Van Meter dan Van Horn (1975; 462-465), (dalam Budi Winarno, 2002; 106 – 118) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar ini bertujuan menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Menurut Van Horn dan Van Meter prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran

dan tujuan-tujuan kebijakan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut.

3. Sikap para pelaksana.

Pemahaman pelaksana mengenai tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan sikap para pelaksana kebijakan.

4. Kondisi-kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Didalam implementasi kebijakan perlindungan petani perkebunan kelapa sawit atas penyaluran pupuk bersubsidi variabel kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik menjadi sangat penting dan menjadi acuan kita dalam melihat keberhasilan suatu implementasi

yang dipengaruhi oleh variabel tersebut atau tidak dipengaruhi.

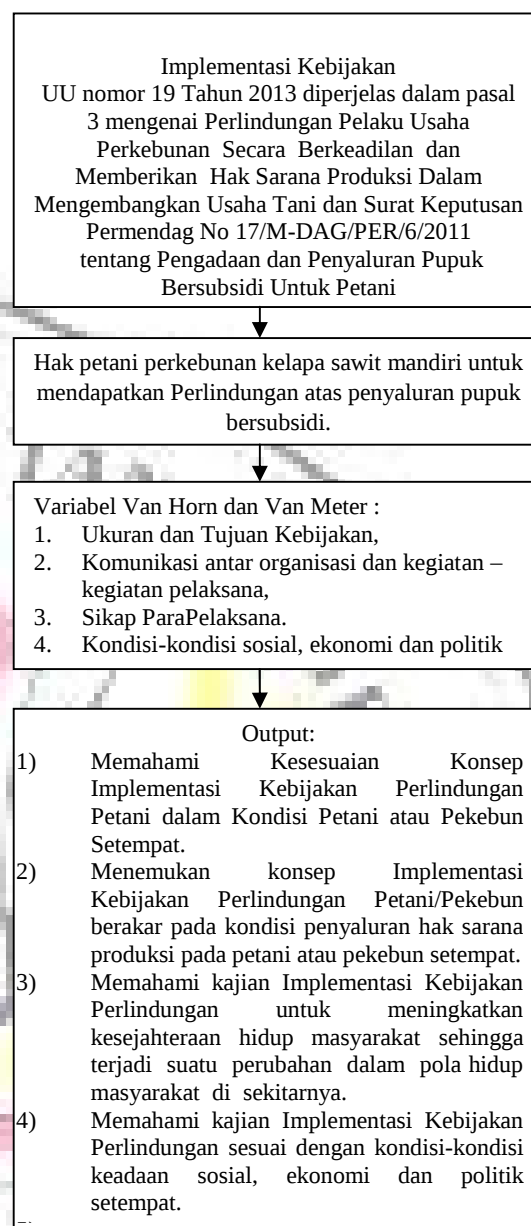
Kerangka Pikir

Agar penelitian berjalan di arah yang benar, maka peneliti membuat suatu pola kerangka berfikir untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada penelitian Proses implementasi kebijakan pemerintah dalam Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Penyaluran Pupuk bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya akan dilihat dari teori Van Horn dan Van Meter (dalam buku Winarno, 2002; 102) yang membatasi implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Melalui 3 variabel yaitu : ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatankegiatan pelaksana, dan sikap para pelaksana.

Lihat gambar 01 kerangka pikir pada halaman berikutnya;

Gambar 01.

Bagan Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penyelesaian masalah dengan menggambarkan menggambarkan situasi tertentu, sikap,

perilaku, pandangan, fenomena, proses yang berlangsung dimasyarakat khususnya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawir Atas Penyaluran Pupuk bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Suatu penelitian kualitatif deskriptif diperdalam melalui cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan mengintrepretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan (pra survey)

Tahap awal dilakukan dengan studi pendahuluan yang dilakukan untuk memperoleh segala informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan atau dengan cara turun langsung ke lapangan.

2. Membuat usulan penelitian

Setelah melakukan studi pendahuluan kemudian dilanjutkan dengan membuat usulan penelitian. Dalam pembuatan usulan didahului studi pendahuluan yang datanya merupakan data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, setelah studi pendahuluan dilakukan maka panduan penelitian dibuat dalam bentuk usulan penelitian dengan melakukan elaborasi berbagai sumber yang mendukung dan yang menghambat proses penelitian.

3. Melakukan penelitian

Melakukan penelitian dilakukan untuk mendapatkan data-data, maupun informasi yang dibutuhkan sebaga pendukung dalam sebuah penelitian baik data skunder maupun data primer, data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti saat dilapangan sedangkan data skunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari informan atau sumber-sumber data atau dokumen yang ada seperti dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari instansi pemerintahan (Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya) dan informan yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi mengenai penelitian.

4. Membuat laporan penelitian

Laporan penelitian ini dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat obsevasi penelitian, hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk sebuah tulisan (skripsi).

- 1.Melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

Melakukan wawancara dengan Kasi Bidang Sarana dan Prasarana Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya, dan Kepala Bidang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian Kubu Raya.

Adapun tempat penelitian yang diteliti penulis adalah di Kecamatan rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Adapun subjek yang dimintai keterangan dalam penelitian ini adalah :

1. Kasi Bidang Sarana dan Prasarana Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya
2. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya
3. Kepala Bidang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian Kubu Raya
4. Kios dan Koperasi Penyalur Pupuk Bersubsidi Resmi
5. Petani Swadaya Mandiri Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Rasau Jaya 3 orang.

Teknik penelitian mengadakan wawancara secara mendalam (*depth Interview*) atau tanya jawab secara langsung dengan para narasumber atau informan yang ditetapkan sesuai dengan kriteria dan tujuan peneliti serta berbagai pihak sumber datangnya informasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, yaitu hasil wawancara yang dilakukan diringkas dalam bentuk rangkuman atau intisari kemungkinan dilakukan editing terbatas, tujuannya adalah data yang di analisis merupakan data yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Kemudian penyajian data penyajian data dilakukan dalam bentuk wawancara yang dilakukan dan disajikan dalam bentuk catatan atau tulisan yang mudah dibaca sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data, dan terakhir

verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang mana triangulasi sumber mengharuskan peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informan yang ada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan daerah, di mana sasaran utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin di

pedesaan dengan memberdayakan ekonomi rakyat, selanjutnya diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih mandiri. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Petani Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 98/Permentan/OT.140/9/2003 tentang Pedoman Perijinan Perkebunan mengamanatkan perlindungan terhadap para pekebun baik petani pekebun (perkebunan rakyat) maupun perusahaan perkebunan besar. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam UU dan Permentan tersebut bermaksud untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh Sarana Produksi Perkebunan yang tepat guna dan tepat harga, untuk mencegah konflik dan memajukan perekonomian daerah. Dan telah diperbaharui oleh Surat Keputusan Permendag No.17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya data penyaluran pupuk tidak dapat dikontrol dari data masuk hingga data pengeluaran pupuk. Pupuk dibagi dalam dua jalur, yang pertama jalur penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian sawah dan tanaman pangan dan jalur yang kedua adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaan teknis lapangan oleh UPTD

sebagai badan yang ditugaskan langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya sebagai penyuluh dan pengontrol, tidak berjalan dengan efektif. Masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat jatah subsidi pupuk oleh pemerintah menjadi tidak mendapat dan dengan terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal dari harga subsidi

Pengontrolan yang tidak efektif menyebabkan terjadinya praktek curang pihak kios yang mengatasnamakan penerima bantuan pupuk bersubsidi menjadi penjual pupuk bersubsidi diluar kontrak kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya. Kios-kios nakal tersebut membeli pupuk bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan data yang tidak dapat terkontrol dan pemborongan pihak kios nakal yang mengatasnamakan masyarakat penerima bantuan pupuk bersubsidi, dengan demikian petani perkebunan yang seharusnya dilindungi akan haknya menjadi terabaikan.

2. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi didalam dan diluar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Menurut

Van Meter dan Van Horn prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Implementasi yang berhasil seringkali dibutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga.

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar-pemerintah, terdapat 2 (dua) tipe kegiatan pelaksana yang merupakan hal yang paling penting yang pertama yakni nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya yang bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dalam mendukung kesuksesan sebuah tujuan bersama yaitu dapat mensejahterakan petani perkebunan dengan melindungi hak-hak mereka harus dapat mengontrol proses berjalannya pengimplementasian sebuah kebijakan tersebut.

Kontrol, dan komunikasi harus dijalin dalam pelaksanaan teknis dilapangan. Sosialisasi dapat dijalankan dengan harapan menarik partisipasi masyarakat petani agar dapat ikut mengontrol dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi yang ada, dan petani juga diharapkan dapat bersumbangsi besar dengan memperlancar data penyaluran pupuk yang semestinya

sesuai administrasi yang dibutuhkan baik oleh koperasi dan pemerintah.

Kedua adalah atasan dapat menyadarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Suatu strategi yang serupa adalah dengan menentukan kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan prosedural, misalnya sistem laporan dan sistem akuntansi dalam regulasi-regulasi yang menyertai penerjemahan dana-dana. Dalam arti dinas pertanian sebagai penyalur pupuk bersubsidi harus dapat mengatur struktur organisasi yang dibawahnya menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat pada sasaran tujuan tersebut dibuat. Mengikuti sanksi dan persyaratan prosedural. Adanya pihak yang dapat dipercaya mengontrol berjalannya seluruh penyaluran di Kecamatan Kubu Raya dengan efektif.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana seharusnya dapat dibina oleh beberapa pihak yaitu Dinas Pertanian sebagai penyalur kebijakan pupuk bersubsidi bagi para petani perkebunan kelapa sawit kemudian Dinas Pertanian memerintahkan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) untuk mengontrol penyaluran pupuk bersubsidi agar tersalur dengan rata dan dapat dinikmati oleh seluruh petani baik itu petani tanaman pangan maupun petani perkebunan kelapa sawit sesuai porsinya yang telah diatur penyalurannya melalui

pendataan dikoperasi ataupun kios yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kubu Raya, dan kemudian dilanjutkan pengimplementasian kebijakan tersebut oleh koperasi atau kios yang bertanggung jawab menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani pemilik perkebunan swadaya mandiri dan menyajikan data lengkap atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai porsinya kepada Dinas Pertanian Kubu Raya agar dapat dipertanggung jawabkan kedepannya.

Namun pada berjalannya kebijakan tersebut kontrol komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan hilang dan tanpa dapat mempertanggungjawabkannya. Sedangkan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor resmi yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian selalu lancar, tetapi kontrol Dinas Pertanian terhadap kegiatan-kegiatan pelaksana seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan pihak kios dan koperasi yang memiliki izin resmi dari pihak Dinas Pertanian tidak diawasi dengan serius.

Kisar harga yang relatif tinggi membuat para petani tersebut merasa tidak dilindungi oleh pihak pemerintah. Proses implementasi kebijakan yang kurang efektif menimbulkan rasa ketidakadilan diantara petani yang tidak dapat menikmati pupuk bersubsidi yang seharusnya dilindungi hak-hak sarana produksi mereka

atas penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani perkebunan swadaya mandiri kelapa sawit.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disini seharusnya sangat diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan yang memiliki tujuan yang sangat baik sehingga dalam implementasinya dapat menjadi tepat sasaran, dan mendapat respon positif dari yang merasakan dan dapat mensejahterakan masyarakat khususnya petani perkebunan sawit swadaya mandiri yang menerimanya.

3. Sikap Para Pelaksana

Didalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Hak Sarana produksi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ini pemahaman mengenai arah sikap pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Sikap para pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, intensitas sikap para pelaksana akan memengaruhi proses dari berjalannya suatu kebijakan tersebut. Dalam arti, bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut.

Intensitas sikap para pelaksana disini akan memengaruhi berjalannya suatu proses kebijakan. Sikap dari pihak-pihak pelaksana yang lepas kendali dengan tidak mengontrol dan meninjau kembali bagaimana proses implementasi yang sedang dijalankan membuat kebijakan yang sudah bagus tersebut menjadi seakan tidak ada hasil dikarenakan sikap para pelaksana kebijakan yang perannya sangat diperlukan tersebut.

Sosialisasi mengenai pembinaan dan pelatihan juga tidak dilakukan dengan efektif, dan tidak merata ke seluruh desa dalam lingkup Kecamatan Rasau Jaya. Kepala Desa Bintang Mas menjelaskan bahwa selama ini pelatihan dan pembinaan di desa mereka dilakukan hanya dengan

kegiatan bertukar pendapat dengan warga-warga yang memiliki pengalaman lebih dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Sikap para pelaksana harus lebih tegas lagi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, agar tidak ada yang merasa dirugikan dengan proses yang telah pemerintah upayakan.

Tantangan dari lingkungan seperti para kios-kios nakal seperti dijelaskan sebelumnya merupakan hal yang wajar terjadi, mengingat pemberlakuan pengawasan yang masih tergolong lemah terhadap para pihak-pihak yang termasuk didalam pengimplementasian kebijakan ini. Sehingga perlunya kesadaran diri dari satu sama lain untuk saling mengingatkan kewajibannya pada divisinya masing-masing. Namun yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh dinas terkait untuk melakukan pengawasan atau program-program kerja yang lebih baik lagi untuk meningkatkan pengawasan terhadap data penyaluran pupuk bersubsidi ini agar lebih tepat pada sasaran kebijakan ini.

4. Kondisi-Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh

variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

Kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik akan saling berpengaruh dengan adanya suatu implementasi yang bersangkutan, dikarenakan sebuah implementasi akan menyangkut berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan perlindungan petani perkebunan kelapa sawit atas penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berupa monopoli harga dan kecurangan-kecurangan yang terjadi atas kelalaian pihak pemerintah dalam mengontrol penyaluran pupuk bersubsidi tersebut sehingga tidak tepat pada sasaran.

Diketahui tujuan dari suatu kebijakan adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan membantu mengurangi sedikit masyarakat yang memang seharusnya dibantu. Keadaan ekonomi pada Desa Bintang Mas khususnya yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit yang mana mereka hanya memiliki lahan yang terbatas. Lahan bantuan pemerintah khusus untuk penduduk transmigran yang lokasinya jauh dari pusat kota.

Mereka memanfaatkan dengan baik lahan tersebut untuk mereka kelola sebagai

mata pencaharian utama mereka. Yang seharusnya pemerintah sudah penuhi hak-hak mereka dengan adanya kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi, yang dapat mereka beli dengan harga murah tetapi lepas kontrol dari pemerintah menyebabkan sebagian masyarakatnya tidak dapat menikmati penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Permainan harga yang dilakukan oleh sebagian oknum-oknum yang ingin mendapatkan pendapatan lebih dengan membeli pupuk bersubsidi melebihi aturan batas yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kemudian pupuk tersebut mereka jual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Karena keadaan yang mendesak dan perkebunan mereka yang harus tetap mereka berikan pupuk minimal tiga bulan sekali dan maksimal setiap satu bulan sekali menjadikan masyarakat tetap membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan harga yang sudah dinaikan oleh oknum-oknum kios yang tidak mendapatkan izin penjualan pupuk tersebut.

Kondisi seperti ini berkaitan dengan sikap sosial pemerintah melihat kebijakan yang mereka implementasikan tidak dapat berjalan efisien dan dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berhak menerimanya, keterkaitan antar sosial dan politik yaitu kepentingan pribadi para pejabat-pejabat pemerintah disini sangat terlihat. Keadaan politik berdasarkan kepentingan pribadi

diantara pejabat-pejabat pemerintah disini membuat implementasi berjalan dengan tidak semestinya. Kontrol dari pihak atas terhadap para pelaku kebijakan sangat diperlukan guna keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan-tujuan mengenai untuk apa kebijakan tersebut dibentuk.

E. KESIMPULAN

Berbagai pemaparan tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Hak Sarana Produksi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang telah peneliti jabarkan diatas dengan menggunakan teori yang ada, maka ada beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Ruang lingkup (cakupan) perlindungan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Terhadap Petani Perkebunan diperjelas dalam pasal 3 mengenai Perlindungan Pelaku Usaha Perkebunan Secara Berkeadilan dan Memberikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dalam Mengembangkan Usaha Tani dan Surat Keputusan

Permendag No 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Petani. bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks, namun tidak didasari dengan ukuran-ukuran kemampuan pihak pemerintah untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi

2. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Adanya pengaruh dari komunikasi yang kurang efektif dalam mekanisme-mekanisme lapangan dan prosedur-prosedur lembaga. Atasan yang kurang menyadarkan pada sanksi baik itu sanksi positif maupun negatif demi kelancaran suatu proses implementasi. Komunikasi anatarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana perlu diperkuat, dengan menunjukan sikap persuasif bersama-sama mengajak para pejabat dinas melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan para petani perkebunan.

3. Sikap para pelaksana,

Intensitas sikap para pelaksana akan memengaruhi proses dari berjalannya suatu kebijakan. Sikap dari pihak-pihak pelaksana yang lepas kendali dengan tidak mengkontrol dan meninjau kembali bagaimana proses implementasi yang sedang dijalankan membuat kebijakan yang sudah bagus

tersebut menjadi seakan tidak ada hasil dikarenakan sikap para pelaksana kebijakan yang perannya sangat diperlukan untuk menunjang proses keberhasilan kebijakan

4. Kondisi-kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Keterkaitan antara berbagai kepentingan pribadi baik dari segi sosial, ekonomi dan politik pejabat-pejabat pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang membuat penyaluran terhambat dan tidak tepat sasaran.

F. SARAN

1. Dinas Pertanian Kubu Raya dan atau pihak UPTD dan pihak yang terkait hendaknya terus menerus memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, untuk melihat kelemahan ataupun kekurangan yang dirasakan dalam implementasi kebijakan perlindungan tersebut. Dan untuk selanjutnya diharapkan dapat melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap kelemahan proses pengimplementasiannya. Khususnya pada pengawasan pihak UPTD yang ditugaskan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi disetiap

kios maupun koperasi harapannya pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Rayamelalui UPTD yang ditunjuk beserta pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya dan para Kelompok Tani melalui Gapoktan yang telah mereka bentuk dapat saling berkonsultasi meminimalisir terjadinya penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak merata sehingga kedepannya para petani perkebunan lebih merasa dilindungi hak-haknya oleh pihak pemerintah.

2. Kelompok sasaran khususnya para petani perkebunan kelapa sawit swadaya mandiri hendaknya membantu proses berjalannya kebijakan tersebut dengan mengingatkan atau melapor kepada para pihak Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian setempat bahwa desa tersebut belum mendapatkan penyaluran ataupun telah terjadi kecurangan dalam penyalurannya. Dan lingkungan sosial juga yang menentukan keberhasilan implementasi tersebut. Untuk itu perlu adanya kontrol sosial dari masyarakat sekitar demi kelancaran program yang telah diimplementasikan.
3. Dinas Pertanian Kubu Raya selaku pelaksana dalam Surat Keputusan Permendag tersebut hendaknya terus melakukan pengawasan kepada para pihak-pihak pelaksana yang terkait dalam kerjasama untuk mensukseskan

pengimplementasian kebijakan tersebut. Dan sebaiknya turun langsung melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya penyaluran pupuk tersebut. Agar petani perkebunan dapat merasakan hak-haknya dilindungi. Dan hendaknya menindak tegas para pihak UPTD yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan semestinya. Dan menindak tegas para kios yang telah bekerjasama dengan pihak Dinas Pertanian Kubu Raya agar menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan penerima hak-haknya.

4. Sebaiknya pihak pemerintah lebih tegas dalam mengontrol berjalannya suatu kebijakan dan jangan ada kepentingan pribadi yang membuat suatu kebijakan yang sudah baik mempengaruhi implementasinya dilapangan.

G. REFERENSI

Buku :

Agung, I.G.N., 2007, *Manajemen Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Ashari, 2009, Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 7 no. 1; 21 – 42, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Frederickson, H. George, 1984, *Administrasi Negara Baru*, Jakarta, LP3ES

Jones, Charles O., 1994, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Penerjemah Ricky Istamto, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sugiyono., 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.

Paoli, Gary D., dkk., 2013, *Sawit di Indonesia; Tata Kelola, Pengambilan Keputusan dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, The Nature Conservancy Indonesia Program,

Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, alih bahasa; Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta, Prenada Media.

Patton, Michael Quinn, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Terjemahan Drs, Budi Puspo Priyadi, M.Hum.) Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media.

Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Spradley, James P., 1997, *Metode Etnografi*, Terjemahan Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.

Straus, David, 2002, *How to Make Collaboration Work, Powerfull Ways to Build Consensus, Solve Problems, and Make Decisions*, San Francisco, Berrett-Koehler Publisher, Inc.

Tachjan, H., 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, AIPI dan Puslit KP2W Lemlid Unpad.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Anilisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.

Winarno, Budi, 2008, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.

Van Meter, Donald S., Carl E. van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process, Administration & Society*, Vol. 6 No. 4 February 1975, London, Sage Publications, Inc

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Surat Keputusan Permendag No.17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani

Rujukan Elektronik:

Irawan, Atep Yulianto., 2015, 11 Agustus, *Luas Lahan Sawit Kalbar Capai 1,3 Ha*, <http://www.infosawit.com/news/2787/luas-lahan-sawit-kalbar-capai-1-3-juta-ha>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia., 2003, *Menperindag Keluarkan Aturan Baru Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi*, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian>

Sutrisno, Leo., 2016, 9 Januari, *Kelapa Sawit*, <http://www.pontianakpost.co.id/kelapa-sawit>



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : TRI NEGAH WIJAYANTI
NIM / Periode lulus : E101131004 / 2017
Tanggal Lulus : 07 Juli 2017
Fakultas/ Jurusan : IAIN
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/ HP : trinegahwijayanti@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa TRI NEGAH WIJAYANTI *) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDUPONGAN PETANI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT ATAS PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN KASAU ZAYA KABUPATEN KUOR KAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara fulltex

☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal PUBLIKA

Dr. Pardi, M. AB
NIP. 19720305 2002121 003

Catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Dibuat di :
Pada tanggal : 26 Juni 2017

TRI NEGAH WIJAYANTI
NIM. E101131004

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)